

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 merupakan suatu peristiwa yang berdampak besar bagi Indonesia. Sejak 2 Oktober 1965, atas perintah Soeharto dengan dalih keamanan ibu kota negara, melakukan penumpasan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Penumpasan ini dilakukan dengan cara pengejaran, penangkapan, dan pembunuhan massal. Lebih dari satu juta orang yang dianggap menganut paham komunisme dibunuh secara kejam. Sekitar lima ratus ribu orang ditahan, puluhan ribu diantaranya ditahan tanpa proses hukum, sebelas ribu diantaranya dibuang ke Pulau Buru.¹

Disamping itu, jutaan orang yang dianggap berhaluan politik kiri mengalami persekusi yang dilakukan oleh negara selama belasan tahun. Dipecat dari pekerjaan, tidak memperoleh pekerjaan lain, diusir dari tempat kediaman, bahkan anak-anak mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. *Didiskriminasi* dan diasingkan dari masyarakat dan hidup sebagai bagian yang membahayakan bagi masyarakat lainnya.² Salah satu tokoh yang menjadi korban dalam penumpasan tersebut adalah Siauw Giok Tjhan.

¹ Siauw Giok Tjhan, *G30S Dan Kejahatan Negara*, (Bandung : Ultimus,2015), hlm.xi.

² Diskriminasi bertalian dengan perilaku yang membeda-bedakan (secara negatif maupun positif, seperti memberikan privilese atau hak istimewa) berdasarkan ras, asal usul etnis, agama, tapi juga warna kulit, gender, umur, keadaan sosial-ekonomis, keadaan fisik, mental dsb. Mely G. Tan, *Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm 265.

Siauw Giok Tjhan yang turut menjadi korban kejahatan pada rezim tersebut memainkan peran penting dalam perpolitikan Indonesia. Siauw seorang peranakan Tionghoa yang dikenal gigih dalam memperjuangkan perbaikan-perbaikan demi emansipasi bangsa Indonesia secara keseluruhan.³ Siauw lahir di Surabaya, 23 Maret 1914.⁴ Sejak kecil Siauw sudah memiliki watak perlawanan atas penghinaan dan ketidakadilan yang terjadi atas dirinya dan etnisnya. Ketidakadilan yang dirasakan Siauw disebabkan diskriminasi yang muncul terhadap kelompok etnis minoritas Tionghoa.⁵

Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dimulai sejak awal pemerintahan kolonial Belanda dengan tujuan awal menjadikan masyarakat Indonesia yang majemuk.⁶ Kebijakan khusus yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda terhadap orang Tionghoa antara lain adalah sistem opsir, sistem pemukiman, sistem pas jalan dan sistem status.⁷ Sistem status yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda membagi Indonesia dalam tiga lapisan atau kelompok, yaitu Golongan Eropa (Belanda) merupakan golongan paling atas, Golongan Timur Asing (Tionghoa, Jepang, Arab, India) merupakan golongan tengah dan golongan yang paling bawah dan mayoritas jumlahnya adalah golongan *inlanders* atau pribumi. Ketiga lapisan tersebut hidup terpisah satu sama lain dalam dunianya

³ Siauw Tiong Djin, *Siauw Giok Tjhan : Riwayat Perjuangan Seorang Patriot Membangun Nasional Indonesia dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika*, (Jakarta : Hasta Mitra, 1999), hlm 1

⁴ Siauw Giok Tjhan, *Lima Jaman Perwujudan Integrasi Wajar*, (Jakarta-Amsterdam, Mei 1981), hlm I

⁵ Mely G. Tan, *Op Cit.* hlm 265-266

⁶ Leo Suryadinata, "Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia" *dalam Simposium Etnis Cina Sebagai Minoritas di Indonesia*, Depok, Oktober 1998, hlm 8.

⁷ Leo Suryadinata, "Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia," *Wacana*, (Vol.1, No.2, Oktober 1999), hlm 226-230.

masing-masing dan berbeda pula dalam kedudukan hukum maupun fungsi serta tingkat ekonominya.⁸ Hal tersebut yang menyebabkan orang Tionghoa semakin terisolasi dari penduduk pribumi.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan tahun 1946⁹ yang bertujuan untuk mempermudah penduduk keturunan asing menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Tujuan pemerintah pada saat itu untuk memperoleh dukungan ekonomi terutama dari masyarakat Tionghoa yang berperan penting dalam perekonomian.¹⁰ Dalam perkembangannya status kewarganegaraan orang Tionghoa yang telah menjadi WNI terancam dengan dikeluarkannya Rancangan Undang-undang (RUU) kewarganegaraan tahun 1954. Selain itu Undang-undang Dwi-Kewarganegaraan yang berusaha menyelesaikan pelaksanaan berjalan sangat lambat.¹¹

Rancangan undang-undang tersebut menciptakan kekhawatiran bagi masyarakat Tionghoa terutama peranakan yang sebagian besar sudah berstatus WNI. Sebagai jalan keluarnya, pada tahun 1954 masyarakat Tionghoa membentuk Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI)¹². Tujuan dibentuknya BAPERKI untuk memperjuangkan hak kewarganegaraan orang Tionghoa di Indonesia. Siauw Giok Tjhan terpilih sebagai ketua BAPERKI yang

⁸ Stuart W. Greif, *WNI: Problematik Orang Indonesia asal Cina*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991), hlm.xii.

⁹ Lihat Lampiran 1.

¹⁰ Maryanti, "*LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa)1963-1967: Kajian Tentang Gerakan Asimilasi Masyarakat Cina di Indonesia*" (Skripsi, FIB UI, Depok, 2000), hlm.4.

¹¹ *Ibid*

¹² BAPERKI adalah sebuah organisasi massa yang anggotanya terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mayoritas Peranakan atau Keturunan Tionghoa. H. Junus Jahya, *Peranakan Idealis: Dari Lie Eng Hok sampai Teguh Karya*, (Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), hlm.207

juga memiliki peran yang sangat besar. Siauw mencanangkan konsep integrasi yang menghendaki warga negara keturunan Tionghoa menyatu ke dalam tubuh bangsa Indonesia dengan tetap mempertahankan kebudayaannya dan diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Sementara status kewarganegaraan belum jelas, pemerintah Indonesia menjalankan beberapa kebijakan ekonomi yang berdampak besar bagi orang Tionghoa, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.10 (PP 10)¹³ yang dikeluarkan pada November 1959. Peraturan Presiden No.10 melarang Warga Negara Asing (WNA) untuk bergerak di bidang perdagangan di wilayah pedalaman atau pedesaan.¹⁴ Peraturan tersebut dipandang sangat diskriminatif dan membuat banyak orang Tionghoa diusir dari wilayah pedesaan dan pulang ke Tiongkok.

Pada tahun 1960 mulai muncul gerakan asimilasi di Indonesia yang bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi tersebut. Pada tahun 1963 kelompok pendukung asimilasi tersebut mendirikan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) yang didukung langsung Angkatan Darat dan dibentuk dengan tujuan menandingi dan membatasi pengaruhnya di dalam masyarakat Tionghoa di Indonesia. Sebagian besar pemimpin LPKB bersimpati pada politik yang berhaluan kanan dan anti komunisme. Sedangkan BAPERKI yang dipimpin oleh

¹³ Lihat Lampiran 2.

¹⁴ Benny, G. *Setiawan, Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: Trans Media, 2008), hlm. 811

Siauw berada dalam kubu politik kiri yang menyangkut cara penyelesaian masalah minoritas Tionghoa di Indonesia.¹⁵

Siauw Giok Tjhan menolak konsep asimilasi tersebut dan menganjurkan konsep integrasi, atau yang sekarang lebih dikenal dengan pluralisme dan dijadikan dasar perjuangan bagi BAPERKI.¹⁶ Gagasan Siauw mengenai Integrasi yaitu Integrasi yang wajar, mengalir apa adanya, tanpa rekayasa dan tanpa ada paksaan. Menurutnya, kecintaan seseorang terhadap Indonesia, tidak bisa diukur dari nama, bahasa dan kebudayaan yang dipertahankannya, melainkan dari tindak tanduk dan kesungguhannya dalam berbakti untuk Indonesia.¹⁷ Siauw sangat menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang menurutnya berarti : berbeda-beda, tetapi tetap satu, tak pernah ada peraturan yang mendua. Mendua baginya berarti diskriminasi.¹⁸

Perjuangan Siauw dalam melawan diskriminasi tersebut dapat dilihat melalui perannya dalam pemerintahan Indonesia. Siauw duduk dalam berbagai badan legislatif sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1946-1947, anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia Sementara (DPR-RIS) tahun 1949, Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) tahun 1950-1959, Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) tahun 1960-1965, anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tahun 1959-1965, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1960-1965, dan pada

¹⁵ Siauw Tiong Djin, *Op.Cit.* hlm.354.

¹⁶Siauw Tiong Djin, *Op.Cit.* hlm.355.

¹⁷ Go Gien Tjwan, Daniel .S, Somers Marry, Boediman Arief, *Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan BAPERKI dalam Sejarah Indonesia dengan Pidato Bung Karno pada Kongres-8 BAPERKI (Maret-1963) sebagai makna "Nation Building"*, (Jakarta : Hasta Mitra, 2000), hlm 23

¹⁸ Siauw Tiong Djin, *Op.Cit.*, hlm. 366-367

tahun 1954-1966 Siauw menjadi ketua umum BAPERKI. Salah satu peninggalan BAPERKI adalah Universitas Respublica (URECA) yang pada saat ini berubah menjadi Universitas Trisakti.

Pada 4 November 1965 Siauw dan beberapa tokoh BAPERKI lainnya ditangkap. Salah satu peninggalan BAPERKI, Universitas Respublica dibakar oleh massa yang didukung oleh militer pada tanggal 15 Oktober 1965. Pada Maret 1966, BAPERKI resmi dibubarkan, dan saat itu juga Siauw dipecat dengan hormat dari keanggotaan DPR, MPRS, dan DPA. Siauw menjadi tahanan politik selama 12 tahun tanpa proses hukum yang jelas. Selama dipenjara ia banyak bertemu dengan orang-orang hebat, ia pun banyak menulis dan menganalisis tentang kejadian 30 September dengan sangat teliti. Siauw diijinkan pulang kerumah dengan status tahanan rumah pada 1975 hingga 1978.

Selepasnya dari status tahanan pada 1978, kondisi Siauw mulai melemah dikarenakan tekanan yang ia dapatkan di penjara. Siauw dan istrinya terbang ke Belanda untuk berobat. Tidak sampai disitu perjuangan Siauw, setibanya di Belanda, ia aktif dalam berbagai kegiatan. Kehadirannya di Belanda mengubah pola kerja para pelarian politik Indonesia yang menetap disana. Ia juga memimpin usaha pengumpulan dana untuk para eks-tahanan politik dan keluarganya. Selain itu, Siauw juga sering memberi ceramah tentang keadaan politik Indonesia dan jalan keluarnya diberbagai kota di Eropa.¹⁹ Siauw meninggal dunia pada 1981 sebelum ia sempat memberikan ceramah mengenai Indonesia dihadapan para ahli Belanda di Universitas Leiden.

¹⁹ Siauw Tiong Djin, *Op.Cit.*, hlm. 5

Perjuangan yang telah dilakukan Siauw untuk tanah airnya, Indonesia berlangsung lebih dari 40 tahun ini memiliki tujuan utama yaitu terbentuknya masyarakat Indonesia yang makmur dan sosialis. Garis perjuangan ini menurutnya sesuai dengan apa yang dikandung dalam UUD 1945. Di dalam masyarakat yang diidamkan Siauw, setiap warga negara Indonesia hidup di dalam negaranya secara harmonis dan tidak merasakan adanya diskriminasi rasial.²⁰ Tak sedikit tokoh yang berpandangan bahwa Siauw terlalu kekirian, dan tak sedikit juga para tokoh yang berada dibelakang mendukung dan bekerjasama dengan Siauw. Ia sangat memperjuangkan haknya sebagai warga negara Indonesia keturunan Tionghoa bersama-sama dengan orang keturunan Tionghoa lainnya untuk diakui sebagai warga negara Indonesia. Itulah tujuannya didirikannya BAPERKI bersama orang keturunan Tionghoa lainnya.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian dari pemikiran di atas, permasalahan yang diangkat adalah Siauw Giok Tjhan dan Perannya dalam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia tahun 1954-1966. Batasan tahun 1954-1966 dipilih karena pada tahun 1954 didirikan organisasi BAPERKI (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Rentang waktu yang dipilih sampai tahun 1966 karena pada tahun tersebut merupakan akhir dari masa kejayaan BAPERKI.

²⁰ Siauw Tiong Djin, *Op.Cit.*, hlm 23

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup bidang politik pada tahun 1954-1966. Pokok permasalahan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan yang difokuskan dan rumuskan, yaitu:

1. Bagaimana peran Siauw Giok Tjhan dalam memperjuangkan hak kewarganegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana peran Siauw Giok Tjhan dalam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI)?
3. Bagaimana pemikiran Siauw Giok Tjhan dalam menghadapi kebijakan asimilasi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Siauw Giok Tjhan dan Perannya dalam organisasi BAPERKI, bagaimana peran Siauw Giok Tjhan dalam memperjuangkan hak kewarganegaraan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemikiran Siauw Giok Tjhan tentang Integrasi, terhadap kebijakan Asimilasi di Indonesia yang kurang mendapat sorotan bagi publik pada era ini.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan :

- Kegunaan Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pelengkap kajian sejarah nasional Indonesia, khususnya tentang etnis minoritas Tionghoa pada masa Orde Lama sampai Orde Baru.

- Kegunaan Praktis:

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk pengayaan dalam pembelajaran dan perkuliahan baik ditingkat Sekolah maupun di Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Khususnya kajian sejarah nasional Indonesia masa Orde Lama sampai Orde Baru.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka diperlukan metodologi sejarah untuk mengkaji penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model deskriptif-naratif yaitu, penulis mendeskripsikan secara logis dan

sistematis dalam penelitian ini.²¹ Metode penelitian sejarah yang digunakan oleh sejarawan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian tersusun dalam empat tahap, yaitu: Heuristik (pengumpulan sumber), Verifikasi (kritik), Interpretasi (menafsirkan), dan Historiografi (penulisan) yang diungkapkan oleh Louis Gottschalk.²²

- Heuristik (pengumpulan sumber)

Pada tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema penulisan baik sumber primer maupun sumber sekunder. Peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai buku-buku yang berkaitan dengan tema penulisan yang terdapat di beberapa perpustakaan seperti, Perpustakaan UNJ, Perpustakaan UI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Daerah Jakarta Selatan, Ruang Baca Prodi Sejarah UNJ, Museum Pusat Pustaka Peranakan Tionghoa. Penulis juga mendapatkan Arsip dan Surat Kabar yang berasal dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

- Verifikasi (kritik)

Pada tahap ini peneliti akan mengkaji dan mengkritik sumber-sumber yang telah diperoleh. Kritik dilakukan untuk

²¹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sejarah Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm.9

²² Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta; Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975) hlm.18

menguji autentisitas (kritik ekstern) dan kredibilitas (kritik intern) sumber tersebut.²³ Uji autentisitas (kritik ekstern) yaitu, melakukan uji atas keaslian yang meliputi kapan, dimana, siapa, mengapa, dari bahan apa sumber itu dibuat. Sedangkan uji kredibilitas (kritik intern) yaitu, penulis melakukan uji analisis dengan membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lainnya.

- Interpretasi (menafsirkan)

Pada tahap ini peneliti akan menafsirkan fakta-fakta historis dari sumber sejarah yang telah diverifikasi sebelumnya. Interpretasi merupakan bagian penting untuk menghasilkan fakta sejarah.

- Historiografi

Tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah ini adalah Historiografi, yaitu mengungkapkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan jelas sesuai kaidah penelitian ilmiah.²⁴ Tahapan ini merupakan tahapan yang penting dalam menjelaskan topik penelitian, sehingga penelitian ini terlihat jelas dan mudah dimengerti, dan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan di dalam rumusan masalah diatas.

²³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013) hlm.77-78

²⁴ *Ibid*, hlm.9

2. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang digunakan dalam penulisan ini didapat dari buku-buku terkait yang membahas tentang Siauw Giok Tjhan dan buku-buku yang membahas tentang BAPERKI, Peranakan Tionghoa di Indonesia, kebijakan kewarganegaraan di Indonesia dan beberapa dokumen yang menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapat dari dokumen atau arsip yang membahas atau bersinggungan dengan Siauw Giok Tjhan atau hak kewarganegaraan di Indonesia. Beberapa surat kabar sezaman yang memuat tentang Siauw Giok Tjhan atau BAPERKI, dan beberapa surat kabar sezaman yang pernah Siauw Giok Tjhan tulis dan terbitkan.

Selain sumber primer, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber sekunder yang didapatkan dari berbagai literatur berupa buku yang relevan dengan fokus pembahasan berupa buku yang ditulis oleh Siauw Tiong Djin, Ong Hok Ham, Leo Suryadinata, Benny G. Setiono, jurnal, artikel, surat kabar, thesis, dan disertasi.

E. Sistematika Penulisan

Penyajian hasil penelitian “Siauw Giok Tjhan dan Perannya dalam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) tahun 1954-1966” agar mudah dipahami dan dapat diperoleh gambaran dalam pemahaman penelitian ini, maka peneliti menyusun secara sistematis hasil penelitian tersebut dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama dalam skripsi ini membahas mengenai dasar pemikiran penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penulisan, metode yang digunakan dan sistematika penulisan. Untuk memberikan gambaran mengenai Peran Siauw Giok Tjhan sebagai seorang tokoh di Indonesia yang berjuang melawan rasialisme.

Bab kedua membahas mengenai sejarah singkat etnis Tionghoa di Indonesia, dualisme antara Cina dan Tiongkok, perbedaan Totok dan Peranakan, latar belakang Keluarga, Pendidikan, dan Karier Siauw Giok Tjhan.

Bab ketiga membahas mengenai status kewarganegaraan golongan Tionghoa di Indonesia, kebijakan asimilasi di Indonesia, lahirnya pemikiran integrasi, serta perdebatan antara asimilasi dan integrasi di Indonesia.

Bab keempat membahas mengenai lahirnya organisasi BAPERKI, peran BAPERKI dalam pemilu 1955, dan akhir dari BAPERKI.

Bab kelima menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang dijelaskan pada bab kedua, ketiga, dan keempat. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab pertama.